

# Bab 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan memiliki perbedaan terutama berkenaan dengan skala bisnis maupun organisasi. Skala bisnis yang berbeda akan menentukan perbedaan jumlah kegiatan bisnis perusahaan. Hal ini akan berdampak pada skala struktur organisasi untuk mendukung perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Semakin kompleks kegiatan bisnis, perusahaan harus mempersiapkan struktur organisasi yang kompleks juga bahkan sampai membentuk anak-anak perusahaan. Hal ini juga menuntut kebutuhan implementasi teknologi informasi untuk mempermudah mengelola perusahaan.

Perkembangan era Industri 4.0 membutuhkan penerapan teknologi informasi sebagai transformasi digital. Penerapannya sudah harus mengimplementasikan internet atau jaringan untuk menghubungkan pengelolaan proses teknologi informasi antar bidang dalam perusahaan atau dengan perusahaan lain. Hal ini menjadi sangat mungkin untuk mendefinisikan enterprise lintas perusahaan baik dengan supplier ataupun mitra lainnya.

Dinas Kesehatan Jawa Barat merupakan Dinas di tingkat provinsi. Dinas tingkat provinsi harus dapat mengelola dan berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan kota maupun kabupaten untuk mengelola tingkat kesehatan wilayah Jawa Barat. Oleh karena itu, kebutuhan untuk teknologi informasi yang terintegrasi antar dinas menjadi sangat dibutuhkan.

Dinas Kesehatan Jawa Barat menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-government, dikarenakan munculnya Perpres No 95 Tahun 2018 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan SPBE. Seiring dengan penerapan SPBE, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus bergegas untuk mencapai target Jawa Barat *Smart Province*. Program ini ditujukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang berbasis digital, sehingga program menjadi lebih efisien dan transparan, terutama di bidang kesehatan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat pedesaan, terutama mereka yang tinggal di wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan), kerap menemui kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, bahkan jauh lebih sulit

ketimbang masyarakat di kota. Kesenjangan dalam pelayanan kesehatan harus diatasi dengan mendorong percepatan pembangunan layanan internet berkecepatan tinggi yang menyebar ke seluruh wilayah Jawa Barat. Dalam pelayanan publik di era teknologi informasi yang pesat ini, kecepatan merupakan suatu hal yang sangat penting. Pemerintah sudah mengambil langkah awal dalam melaksanakan validasi evaluasi mandiri kondisi SPBE saat ini di seluruh instansi pemerintah. Namun pada prakteknya, pembangunan pelayanan ini memakan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan prosedur. Kondisi ini harus diatasi dengan tepat oleh lembaga pemerintahan yang seharusnya dapat berpartisipasi dengan berkembangnya teknologi yang ada. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik yang merata kepada seluruh warga negara.

Masalah yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan adalah pemanfaatan teknologi informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis pada sebuah organisasi atau perusahaan. Penggunaan teknologi informasi yang tepat seharusnya dapat mendukung produktivitas bisnis sebuah organisasi atau perusahaan baik internal maupun eksternal. Jadi, sebelum melakukan penerapan teknologi informasi di sebuah organisasi atau perusahaan, perlu dilakukan perancangan atau pemodelan terlebih dahulu untuk memberikan gambaran bagaimana solusi teknologi informasi yang tepat bagi kebutuhan sebuah organisasi atau perusahaan.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang dalam mencapai target angka yang telah ditentukan demi tercapainya Jabar Smart Province. Smart Province adalah penerapan provinsi pintar yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien. Program Jabar Smart Province ditujukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang berbasis digital, sehingga program menjadi lebih efisien dan transparan, pada bidang pendidikan, infrastruktur dan terumata kesehatan (Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Telkom University, 2019). Namun kenyataannya, pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki nilai indeks SPBE yang kurang baik yaitu dengan nilai rata-rata 2,27. Dengan nilai ini Pemerintah Daerah Jawa Barat

dapat mengakselerasi peningkatan penerapan dan keterpaduan SPBE rata-rata minimal 2,6 atau berpredikat baik dalam rangka mewujudkan Jawa Barat Juara (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2019). Pada Tabel 1.1 merupakan predikat indeks SPBE menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018:

**Tabel 1.1 Predikat Indeks SPBE (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018)**

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Pada Tabel 1.1 diatas, diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dapat berkontribusi dalam mendorong predikat indeks SPBE pada Pemerintah Daerah Jawa Barat. Tentunya untuk mencapai target yang diharapkan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat perlu menerapkan integrasi pada proses bisnisnya dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung. Selain integrasi pada proses bisnis, aplikasi diharapkan dapat meminimalisir terjadinya redundansi data agar masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat.

Selain itu, permasalahan lainnya yang ada di Dinas Kesehatan Jawa Barat khususnya yang berkaitan dengan fungsi Kesehatan Masyarakat adalah kurangnya transparansi data terkait layanan gizi dan kesehatan masyarakat, kurangnya monitoring terkait pendataan dan monitoring kesehatan masyarakat serta masih rendahnya manajemen sistem informasi kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, Fungsi Kesehatan Masyarakat telah menerapkan penggunaan teknologi informasi yang dapat membuat operasional Fungsi Kesehatan Masyarakat menjadi lebih mudah. Namun, penerapannya belum maksimal dan masih perlu untuk ditingkatkan. Hal ini disebabkan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat tidak memiliki blueprint *enterprise architecture* fungsi kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Jawa Barat. Hal ini berakibat

penyediaan aplikasi belum sejalan dengan pengembangan bisnis dan belum memenuhi integrasi aplikasi satu dengan lainnya. Oleh karena itu, Provinsi Jawa Barat membutuhkan rancangan Enterprise Architecture fungsi kesehatan masyarakat yang selaras antara penyediaan teknologi informasi dan fungsi bisnis kesehatan masyarakat.

Dalam penelitian ini framework Enterprise Architecture yang digunakan adalah TOGAF. TOGAF adalah salah satu framework yang memiliki perancangan dan pemodelan lengkap untuk menggambarkan sistem informasi yang dapat mendukung kebutuhan sebuah organisasi atau perusahaan. TOGAF memiliki prinsip yang mendukung *decision making* pada suatu perusahaan, memberikan acuan/petunjuk terhadap *IT resources*, dan mendukung prinsip-prinsip arsitektur untuk pengembangan dan implementasi (Lise, 2006). Enterprise Architecture merupakan pengorganisasian logika untuk proses bisnis dan infrastruktur TI yang mencerminkan integrasi dan persyaratan standarisasi dari model operasi sebuah perusahaan. (TOGAF Standard Courseware v9.1 Edition, 2011). Dengan menggunakan enterprise architecture diharapkan akan mampu menjawab bagaimana model dan rancangan teknologi informasi yang tepat agar dapat selaras dengan kebutuhan bisnis sebuah organisasi atau perusahaan.

Metode yang digunakan dalam penyusunan EA adalah TOGAF ADM. Terdapat 10 fase dalam TOGAF ADM untuk melakukan perancangan enterprise architecture, yaitu Preliminary Phase, Architecture Vision, Business Architecture, Information System Architecture, Technology Architecture, Opportunities and Solution, Migration Planning, Implementation Governance, Architecture Change Management (The Open Group, 2011). Namun, fase yang digunakan adalah hingga fase *Technology Architecture* sesuai dengan permasalahan penelitian.

Dengan menggunakan fase-fase yang ada di dalam TOGAF, maka dapat diketahui kondisi eksisting dari *enterprise architecture* Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat khususnya bidang Kesehatan Masyarakat, mengukur perbedaan antara kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan dan akhirnya bisa memberikan masukan terkait dengan desain *architecture* yang dapat

memaksimalkan penerapan IT di dalam Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat khususnya bidang Kesehatan Masyarakat. Desain *architecture* yang diberikan akan meliputi dari aplikasi, data, teknologi yang berlandaskan kebutuhan bisnis.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana arsitektur bisnis, sistem informasi dan teknologi eksisting pada fungsi kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Jawa Barat?
2. Bagaimana gap antara eksisting dan target untuk arsitektur *enterprise architecture*?
3. Bagaimana arsitektur aplikasi dan arsitektur data pada fungsi kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Jawa Barat?
4. Bagaimana arsitektur teknologi pada fungsi kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Jawa Barat?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Menghasilkan arsitektur bisnis, sistem informasi dan teknologi eksisting pada fungsi kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Jawa Barat.
2. Menghasilkan gap antara eksisting dan target untuk arsitektur *enterprise architecture*.
3. Menghasilkan arsitektur aplikasi dan arsitektur data pada fungsi kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Jawa Barat.
4. Menghasilkan arsitektur teknologi pada fungsi kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Jawa Barat.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari tersedianya arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi antara lain sebagai berikut:

1. Arsitektur Bisnis, sistem informasi, dan teknologi eksisting akan menjadi *baseline* atau acuan awal dalam mengidentifikasi penerapan

bisnis sistem informasi dan teknologi saat ini di Dinas Kesehatan Jawa Barat Fungsi Kesehatan Masyarakat.

2. Gap pada masing-masing domain arsitektur akan menjadi acuan untuk melihat kekurangan yang ada dan kemudian akan dilakukan perbaikan atau inovasi dalam penyediaan arsitektur *enterprise architecture* pada Dinas Kesehatan Jawa Barat Fungsi Kesehatan Masyarakat.
3. Arsitektur Sistem Informasi menjadi acuan bagian arsitektur teknologi informasi untuk menyediakan aplikasi dan data sesuai dengan kebutuhan bisnis Dinas Kesehatan Jawa Barat fungsi kesehatan masyarakat.
4. Arsitektur Teknologi menjadi acuan untuk penyediaan infrastruktur teknologi informasi Dinas Kesehatan Jawa Barat fungsi kesehatan masyarakat.

### **1.5 Batasan Masalah**

Batasan masalah ini yaitu merancang *enterprise architecture* berbasis framework TOGAF ADM Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berfokus pada bagian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada fungsi kesehatan masyarakat dengan dibatasi pada:

1. Penelitian ini menerapkan metodologi TOGAF ADM hingga fase D, yaitu *Technology Architecture*. Masing-masing fase pada TOGAF ADM akan menghasilkan artefak untuk pengembangan *enterprise architecture* yang ada.
2. Fase E, *Opportunity and Solutions*, dan setelahnya merupakan tahap implementasi TOGAF ADM yang dimana hal ini dapat menjadi penelitian lanjutan dan bukan bagian dari penelitian ini.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan menjelaskan isi ringkas dari beberapa bab atas sub bab buku tugas akhir. Berikut ini adalah penjelasan sistematika penulisan buku.

1. Bab 1 (Pendahuluan)

merupakan bab awal yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab 2 (Tinjauan Pustaka)

merupakan tinjauan pustaka yang berisikan konsep dan/atau teori dasar sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan.

3. Bab 3 – (Metodologi Penelitian)

Merupakan penjelasan langkah-langkah dalam meneliti suatu permasalahan.

4. Bab 4 – (Pengumpulan dan Pengolahan Data)

Berisi tentang bagaimana data didapatkan sehingga mendapatkan informasi yang sesuai untuk pengembangan system informasi yang ada menggunakan EA TOGAF ADM. Di mulai dari teknik pengumpulan data, identifikasi data, deskripsi objek penelitian, identifikasi proses bisnis, dan pengolahan data menggunakan TOGAF ADM.

5. Bab 5 – (Analisis dan Perancangan)

Berisi tentang penjelasan dan analisis usulan rancangan *Enterprise Architecture* yang akan diajukan untuk fungsi kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

6. Bab 6 – (Kesimpulan dan Saran)

Bab ini berisi tentang apa saja kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian serta saran untuk ke depannya terhadap rancangan yang telah dibuat.